

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BINJAI

Dhea Rizki Aulia^{*a1}, Murtala^{*a2}, Mutia Rahmah^{*a3}

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

1. Corresponding author : dhea.170430011@unimal.ac.id

2. murtala@unimal.ac.id

3. mutia.rahmah@unimal.ac.id



ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Keywords:

Government Spending Population, GRDP, Local Taxes.

The purpose of this study was to determine the analysis of the factors that affect local revenue. This study aims to analyze and find out how much influence the variables of government expenditure, population, GRDP and local taxes have on local revenue in Binjai City. The data sources were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Binjai City, the Regional Revenue and Asset Financial Management Agency (BPKPAD), supporting books, journals and other articles. The analytical method used in this study is multiple linier regression using the dependent variable, namely local revenue (PAD) while the independent variables are government spending, population, GRDP, and local taxes from 2012 to 2021. Based on the results of the analysis, it can be concluded that concluded : 1) Partially the variable Government Expenditure (X1) has a significant effect on PAD (Y) in the city of Binjai, 2) Partially the variable Total Population (X2) has a significant effect on PAD (Y) in the city of Binjai, 3) Partially the variable GRDP (X3) has no significant effect on PAD (Y) in the city Binjai, 4) Partially the Regional Tax variable (X4) has a significant effect on PAD (Y) in the city of Binjai.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 BAB III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, ada 16 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, namun ada urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang di tentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu, Politik luar

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama.

Tujuan dari adanya Pendapatan Asli Daerah ialah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mendanai terlaksananya otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerah itu sendiri sebagai wujud dari adanya desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Kota Binjai adalah salah satu kota dalam wilayah provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah Barat ibu kota provinsi Sumatra Utara, Kota Medan. Sebelum berstatus Kotamadya, Binjai adalah Ibu Kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Kota Binjai adalah salah satu Kota yang diberi keleluasan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan otonomi daerah. Kota Binjai berdiri sejak tahun 1981 sampai sekarang sudah 39 (tiga puluh sembilan) tahun berdiri tetapi pertumbuhan ekonominya belum begitu meningkat salah satunya dari segi pendapatan asli daerah yang belum meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan oleh daerah tersebut sehingga perlu di ketahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah data pendapatan asli daerah di Kota Binjai yang terealisasi selama beberapa tahun.

Tabel 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Binjai

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Triliun Rp)	Pertumbuhan (%)
2012	48.178.078.000.000	0
2013	49.196.058.000.000	4,91
2014	71.967.138.000.000	7,19
2015	78.327.793.000.000	7,83
2016	97.339.497.000.000	9,73
2017	78.836.498.877.480	7,88
2018	75.715.706.945.890	7,57
2019	70.611.969.806.000	7,06
2020	76.970.022.575.620	7,99
2021	69.409.613.123.380	6,94

Sumber : BPS Kota Binjai (Data Diolah, 2021)

Secara umum dapat dinyatakan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai selama periode tersebut menunjukkan kenaikan secara terus menerus, kecuali jika dilihat dari sisi persentase pertumbuhan dimana nampak jelas berfluktuasi atau naik turun. Naik dan turunnya pertumbuhan pendapatan asli daerah, sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah dan kurang insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka akibatnya pendapatan asli daerah semakin tinggi. Walaupun dalam prakteknya, peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga diperoleh dari pos-pos bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah dan penerimaan dari pemerintah, tetapi penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi indikator utama.

Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pengeluaran pemerintah di Kota Binjai mengalami penurunan yang drastis setiap tahunnya, pengeluaran pemerintah yang menurun drastis pada tahun I, berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang merupakan puncak pengeluaran pemerintah. Demikian juga dengan sektor swasta yang selalu melonjak diakhir tahun. Pengeluaran pemerintah yang menurun tajam sangat mempengaruhi pencapaian PDRB. Berikut ini adalah data pengeluaran pemerintah di Kota Binjai yang terealisasi selama beberapa tahun.

Tabel 2

Pengeluaran Pemerintah Di Kota Binjai

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (TriliunRp)	Pengeluaran Pemerintah (TriliunRp)	Pertumbuhan (%)
2012	48.178.078.000.000	3.881.315.000.000	0
2013	49.196.058.000.000	3.658.160.000.000	3,65
2014	71.967.138.000.000	1.931.264.000.000	1,93
2015	78.327.793.000.000	3.688.217.693.000	3,68
2016	97.339.497.000.000	3.662.767.715.000	3,66

2017	78.836.498.877.480	3.890.000.000.000	3,89
2018	75.715.706.945.890	5.090.000.000.000	5,08
2019	70.611.969.806.000	3.252.983.590.000	3,25
2020	76.970.022.575.620	1.738.937.003.000	1,73
2021	69.409.613.123.380	1.210.340.435.000	1,21

Sumber : BPS Kota Binjai (Data Diolah, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi pengeluaran pemerintah mengalami fluktuasi atau naik turun disetiap tahun, hal ini disebabkan oleh pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah untuk pembangunan dan yang lainnya belum terlalu banyak.

Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang tinggal disuatu wilayah atau daerah tersebut. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Penduduk tidak saja mencakup jumlah, namun termasuk juga komposisi dan distribusinya. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di kota binjai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Santoso dan Rahayu (2005) mengatakan, penambahan penduduk yang tinggi serta diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Dan jika penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Berikut ini adalah data jumlah penduduk di Kota Binjai selama beberapa tahun

Tabel 3

Jumlah Penduduk Di Kota Binjai

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Triliun Rp)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2012	48.178.078.000.000	250.252	0
2013	49.196.058.000.000	252.263	25,22
2014	71.967.138.000.000	261.490	26,14
2015	78.327.793.000.000	264.687	26,46
2016	97.339.497.000.000	267.901	26,79
2017	78.836.498.877.480	270.926	27,09
2018	75.715.706.945.890	273.892	27,38
2019	70.611.969.806.000	276.597	27,65
2020	76.970.022.575.620	279.302	27,93

2021	69.409.613.123.380	295.361	29,53
------	--------------------	---------	-------

Sumber : BPS Kota Binjai (Data Diolah, 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kota Binjai meningkat dari tahun ke tahun. Adam Smith menjelaskan bahwa dengan bukti empiris, jumlah penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga pengguna skala ekonomi di dalam produksi. Jumlah penduduk juga mempengaruhi pendapatan asli daerah, dimana jumlah penduduk naik maka pajak ikut naik.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai pertumbuhannya negatif disebabkan oleh aktivitas perekonomian yang cenderung melambat baik di sektor pemerintah maupun swasta. Berikut ini adalah data produk domestik regional bruto di Kota Binjai selama beberapa tahun

Tabel 4

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kota Binjai

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Triliun Rp)	PDRB (Triliun Rp)	Pertumbuhan (%)
2012	48.178.078.000.000	6.149.903.480.000	0
2013	49.196.058.000.000	6.868.456.400.000	6,86
2014	71.967.138.000.000	7.649.060.640.000	7,64
2015	78.327.793.000.000	8.382.405.130.000	8,38
2016	97.339.497.000.000	9.112.474.350.000	9,11
2017	78.836.498.877.480	9.904.809.540.000	9,90
2018	75.715.706.945.890	10.765.291.760.000	1,07
2019	70.611.969.806.000	11.700.098.100.000	1,17
2020	76.970.022.575.620	11.769.065.000.000	1,171
2021	69.409.613.123.380	12.317.150.000.000	1,23

Sumber : BPS Kota Binjai (Data Diolah, 2021)

Tabel produk domestik regional bruto atas harga konsta menunjukkan bahwa adanya kenaikan disetiap tahunnya. Dalam hal ini, menjelaskan bahwa PDRB dihitung dari penjumlahan dari nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beragam unit produksi di suatu wilayah tertentu, dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

Dilihat darirealisasi pajak di sektor restoran selama 1tahun sebesar Rp 6 miliar, sedangkan potensi pajak seharusnya diperkirakan bisa

mencapai Rp31 miliar pertahun. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Binjai mematokkan besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% pada Sektor Restoran atau Rumah Makan. Kenaikan tarif dilakukan sebagai upaya untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan masih ada beberapa pengusaha restoran nakal yang masih belum kooperatif untuk bersinergi agar realisasi peningkatan pendapatan asli daerah tercapai. Berikut ini adalah data pajak daerah di Kota Binjai yang terealisasi selama beberapa tahun.

Tabel 5

Pajak Daerah Di Kota Binjai

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Triliun Rp)	Pajak Daerah (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2012	48.178.078.000.000	32.801.101.000.000	0
2013	49.196.058.000.000	25.579.358.000.000	2,55
2014	71.967.138.000.000	28.682.985.000.000	2,86
2015	78.327.793.000.000	30.882.624.000.000	3,08
2016	97.339.497.000.000	34.720.281.000.000	3,47
2017	78.836.498.877.480	46.459.663.462.000	4,64
2018	75.715.706.945.890	47.960.043.182.620	4,79
2019	70.611.969.806.000	53.366.589.586.640	5,33
2020	76.970.022.575.620	65.688.557.515.380	6,56
2021	69.409.613.123.380	55.009.873.331.380	5,50

Sumber : BPS Kota Binjai (Data Diolah, 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah Kota Binjai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi terbesar dalam pajak daerah dari tahun ke tahun adalah pajak restoran tetapi masih banyak juga yang tidak mau membayar kenaikan pajak restoran tersebut yang menjadikan pendapatan asli daerah belum mengalami peningkatan yang pesat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

2.3 Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

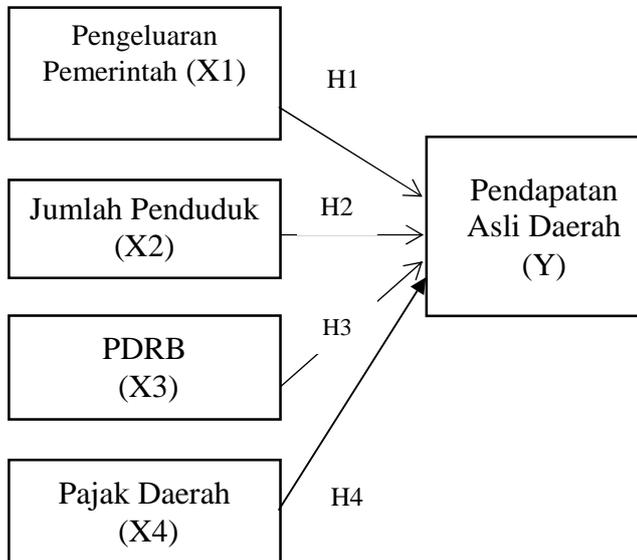
Robinson (2012) di dalam Didu & Fauzi (2016) menyatakan bahwa di lain segi jumlah penduduk merupakan faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan dan konsumsi yang perlu disediakan begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah.

2.4 Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kurniawan (2018) dalam Sukirno (2016) seseorang angkatan kerja yang sedang mencari kerja, tidak bekerja sama sekali atau bekerja selama 35 jam perminggu adalah pengangguran karena tidak dapat memperoleh pekerjaan yang dinginkannya disebut pengangguran. Sedangkan menurut Geodhart (1982) pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, maupun norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai penggantinya.

2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, dimunculkan kerangka berfikir. Berikut gambar pemikiran yang skematis :



Gambar 1 Kerangka Penelitian

2.6 Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan maka dapat dirumuskan tentang hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H2 : Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H3 : Diduga variabel produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H4: Diduga variabel pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Sedangkan objek yang menjadi variabel adalah Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Produk Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan berupa data runtut waktu (time series) selama 10 tahun dari tahun 2012-2021 yang merupakan data yang ada di Kota Binjai. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, , Publikasi Badan Pusat Statistik “Kota Binjai dalam Angka” dan dari berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain buku, artikel, jurnal dan lainnya. Pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), jurnal terkait, artikel dan buku yang mempunyai referensi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. (Sukiati Metodologi Penelitian, 2016). Data yang digunakan yaitu tahun 2012-2021 yang berjumlah 10 tahun.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Dalam Penelitian ini variabel PAD menggunakan data Tingkat PAD (Dalam Persen) di Kota Binjai mulai tahun 2012 hingga 2021.

2. Variabel Independen

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah di Kota Binjai. Satuan dalam ribu rupiah, Data di ambil dari Data Badan Pusat Statistik Kota Binjai tahun 2012-2021.

- b. Pengeluaran Pemerintah Daerah (X2) adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan di Kota Binjai. Satuan dalam ribu rupiah. Dalam hal ini data Pengeluaran Pemerintah merupakan data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai tahun 2012-2021.
- c. Jumlah Penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di Kota Binjai. Data di ambil dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai tahun 2012-2021.
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) di Kota Binjai atas dasar harga konstan. Satuan dalam juta rupiah. Data di ambil dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai tahun 2012-2021.
- e. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Kota Binjai. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai 2012-2021.

Y: PAD

a : konstanta

1, 2, 3: koefisien regresi masing-masing variabel x

X1 : pengeluaran pemerintah

X2 : Jumlah Penduduk

X3 : PDRB

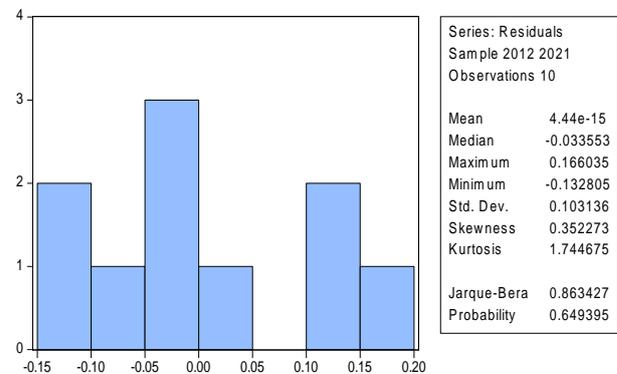
X4 : Pajak Daerah

e : error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas diperlukan untuk mengetahui distribusi data apakah berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan tabel Histogram - Normality Test. Pada penelitian ini nilai residual terdistribusi secara normal apabila nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05.



Sumber: Eviews 9, 2022.

Gambar 2 Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa nilai Jarque Bera sebesar 0,863 dengan nilai probability sebesar 0,649. Adapun nilai Chi Squared tabel di dalam penelitian ini dengan menghitung $df = 4$ pada level signifikansi 5% menghasilkan angka sebesar 9,87. Menunjukkan nilai JB lebih kecil dari taraf signifikansi demikian pula nilai $p = 0,649$ lebih besar dari $\alpha 0,05$ disimpulkan bahwa pernyataan asumsi residual terdistribusi normal terpenuhi.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Jadi tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) menunjukkan adanya multikolinieritas adalah $tolerance < 0.10$ atau sama dengan $VIF > 10$.

3.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (independen) yaitu pengeluaran pemerintah (X1), jumlah penduduk (X2), PDRB (X3) dan pajak daerah (X3) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Pendapatan asli daerah (Y). Hubungan ini biasanya disampaikan dengan rumus persamaanya yaitu :

$$Y = a + 1X_1 + 2X_2 + 3X_3 + e$$

Persamaan diatas dalam penelitian ini yang akan menjelaskan keterkaitan variabel independen dengan dependen. Penggunaan logaritma dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang nilainya tinggi jika data dari nilai tersebut langsung dipakai maka nilai variabel sangat besar dan berkemungkinan terjadinya asumsi klasik. Model persamaan linier berganda dapat dirumsukan sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = a + 1\text{Log}X_1 + 2\text{Log}X_2 + 3\text{Log}X_3 + e$$

Keterangan :

(4) adalah 9,48 karena nilai $\text{Obs} \cdot \text{R-squared}$ 0,32 < 9,48 maka dapat disimpulkan bahwa model diatas lolos dari heteroskedastisitas. Hal ini juga dapat dilihat dari probabilitas Chi-Squared sebesar 0,56 lebih besar dari 0,05.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dengan pendekatan Lagrange Multiplier (LM-Test) Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Pada penelitian ini untuk signifikan menggunakan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Apabila nilai Prob Chi-Squared < 0.05 maka dapat terjadi autokorelasi, Apabila nilai Prob Chi-Squared > 0.05% maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 8
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.688921	Prob. F(2,3)	0.5673
		Prob. Chi-	
Obs*R-squared	3.147308	Square(2)	0.2073

Sumber: Eviews 9, 2022

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat nilai prob. Chi-square 0,2073 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti terbebas dari autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.

4.3 Model Analisis

Adapun metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Untuk mengetahui hasil penelitian dilihat dari output regresi linier berganda menggunakan bantuan E-views 10 sebagai alat analisis. Berikut hasil analisis regresi yang dilakukan.

Tabel 9

Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-52.66134	24.17579	-2.178268	0.0813
X1	0.312974	0.119972	2.608723	0.0477
X2	7.578412	2.311011	3.279262	0.0220
X3	-0.230776	0.185572	-1.243594	0.2688
X4	-0.394469	0.148008	-2.665194	0.0446
R-squared	0.752267	Mean dependent var		31.88343
Adjusted R-squared	0.554080	S.D. dependent var		0.207214
S.E. of regression	0.138372	Akaike info criterion		-0.810890
Sum squared resid	0.095734	Schwarz criterion		-0.659597
Log likelihood	9.054448	Hannan-Quinn criter.		-0.976857
F-statistic	3.795751	Durbin-Watson stat		1.910808
Prob(F-statistic)	0.087994			

Tabel 6
Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 04/16/22 Time: 02:53
Sample: 2015 2020
Included observations: 6

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	584.4688	305256.6	NA
X1	0.014393	6245.996	2.379544
X2	5.340773	436012.0	6.061039
X3	0.034437	16160.01	2.933018
X4	0.021906	11137.68	2.554620

Sumber: Eviews 9, 2022

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan uji *Variance Inflation Factors*. Pada tabel di atas yang menunjukkan bahwa model ini terbebas dari masalah multikolinieritas dengan melihat hasil dari *Centered VIF* dimana menunjukkan tidak ada nilai lebih besar dari 10.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan *white heteroskedasticity* yang tersedia dalam program eviews. Apabila nilai probability < 0.05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai probability > 0.05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.265473	Prob. F(1,7)	0.6223
		Prob. Chi-	
Obs*R-squared	0.328851	Square(1)	0.5663

Sumber: Eviews 9, 2022

Dari hasil tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahan pengganggu antar pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian statistic dengan menggunakan uji ARCH yaitu membandingkan nilai nilai $\text{obs} \cdot \text{R-square}$ dan 2 tabel. Hasil estimasi uji ARCH adalah sebesar 0,40 dan nilai 2 tabel dengan derajat kepercayaan 5% dan df

Sumber: *Eviews 9, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat dilihat koefisien dari masing-masing variabel dan konstanta yang menjadi observasi dalam penelitian ini adalah koefisien (X_1) 0,312 koefisien (X_2) 7,578 koefisien (X_3) -0,23 koefisien (X_4) -0,394 dan konstanta -52,661 Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. Secara persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = -52,661 + 0,312 X_1 + 7,578 X_2 - 0,23 X_3 - 0,394 X_4 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dari tabel diatas dapat diinterpretasikan hasil analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

- Konstanta () sebesar 52,661, hal ini menyatakan bahwa jika tidak ada pengaruh (peningkatan/penurunan) nilai variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 , maka Pendapatan asli daerah adalah sebesar 52,66%
- Koefisien pertama yaitu Pengeluaran pemerintah daerah (X_1) sebesar 0,312, hal ini menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah daerah (X_1) sebesar 1%, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 31,2 %.
- Koefisien kedua yaitu Jumlah Penduduk (X_2) sebesar 7,578 yang berarti setiap peningkatan Jumlah Penduduk (X_2) sebesar 1%, maka akan meningkatkan Pendapatan asli daerah sebesar 7,57%.
- Koefisien ketiga yaitu Produk Domestik Regional Bruto (X_3) sebesar -0,23 yang berarti setiap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (X_2) sebesar 1%, maka akan menaikkan Pendapatan asli daerah sebesar 2,3%. Pengaruh PDRB ini positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. PDRB Kota Binjai dari tahun 2012-2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa perubahan ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD.
- Koefisien keempat yaitu Pajak Daerah (X_4) sebesar 0,394 yang berarti setiap peningkatan Pajak Daerah (X_2) sebesar 1%, maka akan menaikkan Pendapatan asli daerah sebesar 3,94%. Pajak daerah juga

dipengaruhi oleh pengeluaran masyarakat atau konsumsi akan mempengaruhi pajak secara signifikan. Konsumsi masyarakat berupa makanan dan non makanan akan dikenakan pajak, baik pajak pada konsumsi makanan, pajak bangunan ataupun pajak kendaraan. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung jika konsumsi masyarakat meningkat akan meningkatkan pajak daerah. Salah satu upaya agar konsumsi masyarakat meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan perkapita. Perekonomian yang meningkat dan pengangguran yang rendah serta meningkatkan investasi yang masuk merupakan indikator meningkatnya pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Adapun kriteria dalam pengujiannya adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini.

Tabel 10
Hasil Uji t

Variabel Bebas	T-statistik	T Tabel	Prob	Keterangan	Hipotesis
Pengeluaran Pemerintah	2,608	1,943	0,047	Signifikan	Terima (H1)
Jumlah Penduduk	3,279	1,943	0,02	Signifikan	Terima (H2)
PDRB	-1,243	1,943	0,268	Signifikan	Tolak (H3)
Pajak Daerah	-2,665	1,943	0,04	Signifikan	Terima (H4)

Sumber: *Eviews 9, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk Pengeluaran Pemerintah Daerah (X_1) 2,608, Jumlah Penduduk (X_2) 3,279, Produk Domestik Regional Bruto (X_3) -1,243 dan pajak daerah (X_4) sebesar -2,665. Untuk mengetahui tingkat signifikansi secara parsial pada tingkat kepercayaan 100% pengujian hipotesis dengan uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Sebagai berikut:

- a. Pembuktian pengujian hipotesis variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (X_1) Secara parsial (uji t) yang diperoleh dari nilai T_{hitung} pada persamaan regresi linear berganda menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Daerah (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dikarenakan T_{hitung} sebesar 2,608 dan T_{tabel} ($n-4$, 5% uji dua pihak) = 1,943 di mana $T_{hitung} > T_{tabel}$ dengan nilai signifikansi 0,047 dibawah 0,05. Sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.
- b. Pembuktian pengujian hipotesis variabel Jumlah Penduduk (X_2) Secara parsial (uji t) yang diperoleh dari nilai T_{hitung} pada persamaan regresi linear berganda menyatakan bahwa Jumlah Penduduk (X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dikarenakan T_{hitung} sebesar 3,279 dan T_{tabel} ($n-4$, 5% uji dua pihak) = 1,943 di mana $T_{hitung} > T_{tabel}$ dengan nilai signifikansi 0,02 diatas 0,05. Sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.
- c. Pembuktian pengujian hipotesis variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_3) Secara parsial (uji t) yang diperoleh dari nilai T_{hitung} pada persamaan regresi linear berganda menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (X_3) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dikarenakan T_{hitung} sebesar -1,243 dan T_{tabel} ($n-4$, 5% uji dua pihak) = 1,943 di mana $T_{hitung} < T_{tabel}$ dengan nilai signifikansi 0,268 diatas 0,05. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.
- d. Pembuktian pengujian hipotesis variabel Pajak Daerah (X_4) Secara parsial (uji t) yang diperoleh dari nilai T_{hitung} pada persamaan regresi linear berganda menyatakan bahwa Pajak Daerah (X_4) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dikarenakan T_{hitung} sebesar -2,665 dan T_{tabel} ($n-4$, 5% uji dua pihak) = 1,943 di mana $T_{hitung} > T_{tabel}$ dengan nilai signifikansi 0,04 dibawah 0,05. Sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima.

4.4.2 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil nilai koefisien determinasi (adjusted R^2) sebesar 0,752 artinya variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh

variabilitas dari variabel independen sebesar 75,2% sedangkan sisanya 24,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteiti atau tidak masuk kedalam model regresi.

4.4.3 Pengujian Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi dipakai untuk mengetahui seberapa kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari pengujian diperoleh nilai R -Squared sebesar $R = 0.951483$ maka $R = 0.951483 = 0.975439$ maka hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat berhubungan sangat kuat karena nilainya mendekati +1.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti hipotesis H_1 (pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah) diterima. Dimana koefisien antar pengeluaran pemerintah daerah dan PAD bernilai positif, hal ini berarti jika pengeluaran pemerintah daerah semakin meningkat maka PAD juga akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa yang dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh pemerintah Kota Binjai oleh karena itu semakin jelas pengeluaran yang akan dituju oleh pemerintah Kota Binjai maka akan lebih dipercaya oleh masyarakat hal ini dikarenakan informasi yang disajikan dan juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Binjai sesuai dengan yang dilihat dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga hal ini akan memaksimalkan pendapatan daerah yang diperoleh karena kepercayaan masyarakat merupakan pilar utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini didukung oleh Mesra, (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.5.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti hipotesis H₂ (jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah) diterima. Dimana koefisien antar Jumlah Penduduk dan PAD bernilai positif, hal ini berarti jika semakin banyaknya jumlah penduduk maka PAD juga akan mengalami peningkatan.

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah yang berarti dengan tingginya jumlah penduduk dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Mesra, (2017) dan Hibzon (2007) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Adapun penelitian oleh Miragustia Mayza (2015) dan Riandani Rezki Prana (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.5.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga H₃ (Produk Domestik Regional Bruto terhadap pendapatan asli daerah) ditolak. Dimana koefisien antar Produk Domestik Regional Bruto dan PAD bernilai negatif, hal ini berarti jika Produk Domestik Regional Bruto menurun maka PAD juga akan mengalami penurunan.

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa PDRB di Kota Binjai dapat meningkatkan distribusi perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan jenis lapangan usaha yang memberikan sumbangan dan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Kota Binjai akan

mengembangkan perekonomiannya, semakin berkembangnya usaha perdagangan hotel dan restoran maka akan menyebabkan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), peningkatan tersebut akan meningkatkan pajak daerah yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun (2017). Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini yaitu Miragustia Mayza, (2015), Riandani Rezki Prana (2016) dan Mesra (2017).

4.5.4 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat H₄ (pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah) diterima. Dimana koefisien antar Pajak Daerah dan PAD bernilai negatif, hal ini berarti jika Pajak Daerah menurun maka PAD juga akan mengalami penurunan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat atau konsumsi akan mempengaruhi Pajak. Konsumsi masyarakat berupa makanan dan non makanan akan dikenakan pajak, baik pajak yang dikenakan pada konsumsi makanan maupun pajak yang dikenakan pada non makanan. Pajak merupakan sumber pendapatan yang terbesar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung jika konsumsi masyarakat meningkat akan meningkatkan pajak daerah dan sebaliknya, jika konsumsi masyarakat menurun maka akan menurunkan pula pajak daerah tersebut. Salah satu upaya agar konsumsi masyarakat meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan perkapita. Perekonomian yang meningkat dan pengangguran yang rendah serta meningkatnya investasi yang masuk merupakan indikator meningkatnya pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah.

Hal ini berarti upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk meningkatkan PAD adalah merealisasikan peraturan daerah Kota Binjai dengan memanfaatkan peran serta wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang arti pentingnya pajak daerah, upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Sehingga PAD di Kota Binjai dapat meningkat dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riandani Rezki Prana (2016) dan Bambang (2019).

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel Pengeluaran Pemerintah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y) pada kota Binjai.
2. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel Jumlah Penduduk (X_2) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y) pada kota Binjai.
3. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel PDRB (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y) pada kota Binjai.
4. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah (X_4) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y) pada kota Binjai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, peneliti mencoba memberikan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya, yaitu:

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan rujukan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, PDRB dan pajak daerah terhadap PAD di kota Binjai. Serta menambahkan periode penelitian yang lebih banyak dan dapat menambahkan variabel yang lain untuk hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P, H. (2006). *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Jawa: Jurnal Akuntansi dan Sektor Publik.
- Djajaningrat. (2003). *Pendapatan Asli Daerah terjemahan Barata*. Jakarta.
- Dumairy. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gheodart, C. (1982). *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: Djambatan.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D,N. (2013). *Dasar-DAsar Ekonometrika Edisi Kelima*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hair, dkk. (2006). *Multivariate Data Analysis Pearson International Edition 6*. New jersey.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, M. (2014). *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu*. Jakarta.
- Handayani dan Andriyani. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ekonomi* .
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* .

- Ida B, A & I K,S. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. *Jurnal EP Unud* , 12.
- Indonesia, B. (2014).
- Jatmiko, B, &Gilar,I,W.(2019). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Negara. *Jurnal Akuntansi Trisakti*.
- Jaya, G,B,P & Widanta, A.A.B.P. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar . *EJurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* .
- Mangkoesoebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mayza, M, dkk. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi* .
- Mesra, B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Tolls* .
- Purba, H. d. (2007). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi ndan Keuangan Daerah* .
- Rezki, R, P. (2016). Analisis Faktar-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman* .
- Sabera, H. (2002). *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Rajawali.
- Santoso, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Puji. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediiri. *Jurnal Ekonomi* .
- Sihotang, Y.,F. Santoso, H., & Iskandar, D (2015). Kaitan Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta TAhun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi* , 1-25.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai, (2012-2020).
- Bank Indonesia (2016).
- Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, (2012-2020).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian* . Medan: Manhaji.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi*. Jakarta.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Rasa Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wijaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaja. (2002). *Penadapatan Asli Daerah*. Tesis. Universitas Indonesia.